

PELAKSANAAN FUNGSI HUMAS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

IMPLEMENTATION OF THE FUNCTION OF THE PUBLIC RELATIONS IN SLEMAN EDUCATION OFFICE

Oleh: Trie Oktaviani Saputro, Program Studi Manajemen Pendidikan, FIP-UNY
Trieoktaviani30@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan fungsi humas Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi dan menjadi serangkaian kegiatan analisis yang saling berkaitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) program kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi humas yaitu Program Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi. Penyusunan program kerja mengacu pada Renstra (Rencana Strategis). Pelaksanaan program kerja belum sepenuhnya terlaksana dengan baik dan belum maksimal dikarenakan tidak ada bagian khusus yang menangani kehumasan, (2) alur kerja yang terjalin dalam pelaksanaan fungsi humas yaitu e-PPID sudah berjalan sesuai dengan SOP (Standar Operasional Pegawai) dan regulasi yang ada, akan tetapi alur kerja dalam pengelolaan website masih kurang dikarenakan masih banyaknya admin yang mengelola sehingga keamanan website kurang terjaga dan kurang terkoordinasi oleh satu komando, (3) pemanfaatan media di Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman yang telah tersedia sudah dimanfaatkan meski belum maksimal karena SDM (Sumber Daya Manusia) yang kurang dan tidak adanya pegawai yang memiliki tupoksi khusus kehumasan. Pemeliharaan media humas website juga dilakukan setahun sekali dengan melakukan *maintenance website* dan jaringan internet dinas. Untuk pegawai yang belum dapat memanfaatkan media tersebut secara maksimal, diberikan pelatihan khusus untuk memaksimalkan pemanfaatan media humas.

Kata Kunci: Pelaksanaan Fungsi Humas, Dinas Pendidikan.

Abstract

The purpose of the research describe the implementation of the public relations function of Sleman District Education Office. This research uses data condensation analysis techniques, presentation of data and drawing conclusions or verification into a series of interrelated analysis activities. The result showed that: (1) the Sleman Departement of Education work program when it comes to fulfilling a public relations function called the government's affairs program. Preparation of work programs refers to the strategic plan. Implementation of the work program has not been fully accomplished and is not fully accomplished because there is no special section for equal control (2) a workflow entwined in the implementation of a public relations function that e-PPID is already in accordance with standard employee traffic and regulations, however, the workflow in website management is lacking due to the amount of administrator that managed so the website security is underprotected and undercoordinated by a single command, (3) the use of media in the Sleman Departement of Education Service that is available has been taken advantage of despite being underrated due to the absence of employees to special duties. The maintenance of the website's media relations is also done once a year by means of website maintenance and service internet network. For employess who are unable to utilize the media to the full, special training is given to maximize the use of public relations.

Keyword: administration of the pulic relations function, education office

PENDAHULUAN

Berdirinya suatu lembaga tentu tidak lepas dari adanya peran masyarakat. Untuk membina hubungan baik antara lembaga dengan masyarakat diperlukan layanan publik sebagai jembatan komunikasi antara lembaga dan masyarakat ataupun sebaliknya. Sebagai

lembaga pelayanan masyarakat, Dinas Pendidikan tentu memiliki tugas-tugas yang dilaksanakan guna melancarkan maupun pelaksana untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, tugas pokok dan fungsi layanan publik termasuk Dinas Pendidikan harus memenuhi prinsip-prinsip; profesional, penyelenggara,

partisipasi, saling terbuka, dan akuntabilitas proses pelayanan. Pelaksanaan fungsi kehumasan Dinas Pendidikan merupakan implementasi dari pengelolaan informasi publik yang dapat dijadikan salah satu faktor penyelenggaraan pelayanan di lembaga pemerintah Dinas Pendidikan.

Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai kota pelajar memiliki banyak keanekaragaman potensi budaya baik lokal, luar daerah maupun mancanegara serta perkembangan adat istiadat yang membaaur. Kabupaten Sleman merupakan kabupaten yang berbatasan dengan Jawa Tengah di sebelah Utara dan Timur, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta di sebelah Selatan, serta Kabupaten Kulon Progo di sebelah barat. Kabupaten Sleman sendiri memiliki banyak sekolah negeri maupun swasta yang menyokong pendidikan di Indonesia khususnya di Sleman sendiri. Banyaknya sekolah negeri maupun swasta membuat daerah tersebut memiliki banyak pelajar yang berasal dari luar daerah Sleman yang bertujuan menuntut ilmu di wilayah Sleman. Lembaga yang melayani surat mutasi masuk maupun keluar SD dan SMP adalah Dinas pendidikan. Kedudukan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman adalah sebagai salah satu unsur pelaksana pemerintah bidang pendidikan daerah kabupaten Sleman. Dalam pelaksanaannya Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman memiliki visi yang telah disepakati dan ditetapkan. Visi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman adalah terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih Sejahtera,

Mandiri, Berbudaya dan Terintegrasikannya sistem *e-government* menuju *smart regency* (kabupaten cerdas) pada tahun 2021.

Menurut Ruslan (2005: 16) *Public Relation* merupakan manajemen untuk membina, membantu, mendukung, dan memelihara antara unsur internal organisasi dengan unsur eksternal organisasi. Hal ini berkenaan dengan komunikasi, pengertian, penerimaan, dan kerjasama dalam menghadapi persoalan/permasalahan. Sejalan dengan itu Simandjutak, dkk (2003: 9) menjelaskan bahwa tenaga dan bantuan *public relations (PR)* yang professional sangat diperlukan saat lembaga mengalami masalah dan kerugian dari berita maupun rumor. Menurutnya, tugas PR ini membuat klarifikasi kepada publik bahwa semua itu tidak benar. Selain itu, PR juga membantu menjaga citra baik lembaga atau perusahaan, membuat isi teks sambutan Kepala Dinas atau Direktur dan sebagainya, membuat siaran pers, membantu manajemen untuk memilih siapa saja yang layak untuk diundang, baik undangan untuk para pejabat, khalayak di sekitar organisasi, khalayak umum dan sebagainya.

Perlunya Humas di Lembaga Pemerintahan khususnya di Dinas Pendidikan dapat membantu menetralsir persoalan Dinas Pendidikan dan menjadi alat komunikasi internal lebih kepada membangun komunikasi dan distribusi informasi ke dalam personel di lembaga. Salah satu contoh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang sudah menerapkan TIKOMDIK (Teknologi Informasi dan

Komunikasi Dinas Pendidikan) yang di mulai pada tahun 2018. Tujuan dari penerapan TIK dan memiliki visi misi tersendiri adalah demi terwujudnya pelayanan, pemanfaatan media komunikasi serta terlaksananya fungsi kehumasan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Fungsi utama humas adalah menumbuhkan dan mengembangkan hubungan baik antar lembaga (organisasi) dengan publiknya, internal maupun eksternal dalam rangka menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik dalam upaya menciptakan iklim pendapat (opini publik) yang menguntungkan lembaga organisasi (Nova, 2011: 49). Salah satu fungsi humas yaitu sebagai komunikator dapat menumbuhkan hubungan baik dari kedua belah pihak atau lebih. Pelaksanaan fungsi kehumasan tidak lepas dari pemanfaatan teknologi. Hampir semua telah merasakan sentuhan kehadiran teknologi walaupun pada tingkatan yang berbeda, ada yang telah merasakan manfaat positifnya, ada yang belum, dan ada yang justru mengkhawatirkannya (Simandjutak, dkk 2003: 179). Teknologi dapat dimanfaatkan sebagai media komunikasi internal maupun eksternal contohnya grup *whatsapp*, *website*, *facebook*, *instagram* dan sebagainya merupakan contoh aplikasi yang memanfaatkan teknologi yang sudah berkembang pesat. Aplikasi tersebut dapat bermanfaat untuk melaksanakan fungsi kehumasan. Tenaga *public relations* yang profesional dapat memanfaatkan perkembangan teknologi dengan maksimal sehingga menjadi

jembatan komunikasi antara lembaga (organisasi) kepada pihak luar.

Berkenaan dengan itu, menurut hasil wawancara yang dilakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman pada tanggal 18 Februari 2019, di Dinas sendiri sudah menggunakan media berupa *website*. Menurut narasumber, kelebihan dari pengelolaan web oleh admin-admin dari setiap bidang adalah mengetahui dengan jelas berita apa yang ingin dipublikasikan karena admin tersebut berasal dari bidang yang dilakukan. Kenyataan yang terjadi di Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman admin tidak berasal dari bidang kehumasan sehingga belum maksimal dalam pelaksanaan fungsi dan perannya. Peningkatan fungsi kehumasan dapat dilakukan dengan meningkatkan kinerja pegawai dalam bidang kehumasan dengan tujuan terciptanya citra baik lembaga di masyarakat umum karena Dinas Pendidikan sendiri merupakan lembaga yang melayani masyarakat. Berdasarkan kondisi di atas peneliti tertarik untuk meneliti pelaksanaan fungsi humas Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian tentang pelaksanaan fungsi humas Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Penelitian ini merupakan penelitian pada kondisi alami yang akan mendeskripsikan kondisi yang ditemukan di lapangan dalam bentuk fenomena perilaku atau tindakan dalam

sebuah organisasi, karena itu peneliti berusaha untuk melakukan penelusuran.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Juli 2019 di Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Subjek penelitian dalam pelaksanaan fungsi humas Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman adalah pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dan masyarakat yang berkunjung di Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Reduksi Data
- b. Penyajian Data
- c. Penarikan Kesimpulan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Program Kerja Humas Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman

Program kerja merupakan suatu rencana kegiatan organisasi yang dibuat untuk jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama. Dalam sebuah organisasi program kerja merupakan kebutuhan primer yang dapat membantu kegiatan organisasi lebih jelas. Program kerja harus dibuat secara sistematis, terpadu, terperinci serta terarah, sebab program kerja sebagai pegangan mencapai tujuan organisasi.

Sedangkan menurut Dan Lattimore, Otis Baskin, Suzett T. Heiman dan Elizabeth L.Toth (2014: 4) “*public relations* adalah fungsi kepemimpinan dan manajemen membantu pencapaian tujuan sebuah organisasi, membantu mendefinisikan filosofi, serta memfasilitasi tujuan sebuah organisasi, para praktisi *public relations* dengan semua masyarakat internal dan eksternal yang relevan untuk mengembangkan hubungan yang positif serta menciptakan konsistensi antara tujuan organisasi dengan harapan masyarakat. Mereka juga mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi program organisasi yang mempromosikan pertukaran pengaruh serta pemahaman diantara konsistensi organisasi dan masyarakat”. Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Pendidikan sudah melaksanakan fungsi kepemimpinan dalam penyusunan program kerja yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi humas, dan fungsi manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Pegawai Dinas Pendidikan dan semua masyarakat internal maupun eksternal sudah relevan mengembangkan hubungan yang positif sesuai dengan program kerja yang direncanakan dengan tujuan mengembangkan hubungan yang positif serta menciptakan konsistensi antara tujuan Dinas Pendidikan dengan masyarakat.

Menurut Onong Uchjana Effendy (Lena Satlina, 2002: 11) salah satu fungsi dari *public relations* ”menunjang kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan hasil penelitian Dinas pendidikan tidak memiliki bagian khusus yang menangani kahumasan akan

tetapi pelaksanaan fungsi humas terlaksana dan dibawah oleh kesekretariatan sehingga layanan publik sudah terlaksana akan tetapi belum maksimal. Dinas Pendidikan memiliki program kerja yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi humas. Dalam pelaksanaan program kerja sudah terstruktur dan berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Selain sebagai usaha dalam mengurangi dan menyelesaikan permasalahan yang timbul, program kerja yang direncanakan Dinas Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

2. Alur Kerja Fungsi Humas Dinas

Pendidikan

Alur kerja merupakan suatu kegiatan atau langkah-langkah yang ada dalam pelaksanaan fungsi humas. Alur kerja terdiri dari langkah-langkah aktivitas yang berurutan dan memiliki aturan-aturan tertentu yang ada didalamnya sehingga dapat digunakan untuk mencapai sebuah tujuan yang ditetapkan. Sodang P dalam Suharsaputra (2010: 23) mengemukakan pendapatnya bahwa organisasi merupakan unit yang dikoordinasi dan berisi paling tidak dua orang atau lebih, yang fungsinya adalah untuk mencapai tujuan bersama atau sepakat tujuan bersama. Berdasarkan hasil penelitian, program kerja dan layanan publik sudah terkoordinasi dengan baik akan tetapi belum maksimal. Sedangkan komunikasi yang terjalin di Dinas Pendidikan sendiri sudah baik akan lebih baik jika ada bagian khusus humas dalam pelayanan publik karena humas akan terfokus dengan tugas pokok fungsinya tanpa harus ada beban kerja lain.

Menurut Alvie Smith, dalam buku Cutlip, Center dan Broom (2009: 254), ada dua faktor yang mempengaruhi komunikasi internal dengan karyawan menambah rasa hormat manajemen terhadap salah satu fungsi humas :

- a. Arti penting pemahaman, *teamwork*, dan komitmen karyawan dalam mencapai hasil standar Aspek Positif dari perilaku karyawan ini sangat dipengaruhi oleh komunikasi dua arah yang interaktif diseluruh organisasi.
- b. Kebutuhan untuk membangun jaringan komunikasi-manajer, jaringan yang membuat setiap supervisor disetiap level bisa melakukan komunikasi secara efektif dengan karyawannya. Kebutuhan ini bukan sekedar informasi yang berkaitan dengan tugas dan harus mencakup isu publik dan isu bisnis mempengaruhi keseluruhan organisasi.

Berdasarkan hasil penelitian alur kerja yang dilaksanakan dalam Dinas Pendidikan terjalin dalam pengelolaan *website* resmi Dinas Pendidikan dan *website* e-PPID. *Website* yang tersedia sudah dikoordinasi dan berisi lebih dari dua orang dengan tujuan bersama. Selain itu pegawai juga sudah memahami arti penting *teamwork*, dan berkomitmen dalam mencapai standar aspek positif dari perilaku yang berlandaskan komunikasi dua arah yang interaktif sudah terjalin dengan baik antar pegawai yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Pengelolaan *website* resmi Dinas Pendidikan dan e-PPID melibatkan lebih

dari satu pegawai baik di bidang yang sama atau berbeda.

Menurut Widjaja (2008: 55), tujuan humas untuk mengembangkan hubungan harmonis dengan pihak lain yakni publik (umum/masyarakat). Tujuan humas adalah untuk menciptakan, membina, dan memelihara sikap budi yang menyenangkan bagi lembaga atau organisasi disuatu pihak dan dengan publik dilain pihak dengan komunikasi yang harmonis dan timbal balik. Tugas pokok atau beban kerja humas suatu lembaga atau organisasi adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan informasi dan menyampaikan ide (gagasan) kepada masyarakat atau pihak lain yang membutuhkan informasi dan gagasan tersebut agar masyarakat mengetahui maksud, tujuan, dan kegiatannya sehingga pihak lain di luar organisasi dapat merasakan manfaatnya.
- b. Membantu pimpinan yang karena tugas-tugasnya tidak dapat langsung memberikan informasi kepada masyarakat atau pihak yang memerlukan.
- c. Membantu pimpinan untuk mempersiapkan bahan tentang masalah dan informasi yang akan disampaikan atau yang menarik perhatian masyarakat pada saat tertentu. Dengan demikian pimpinan selalu siap memberikan bahan-bahan informasi baru.
- d. Membantu pimpinan mengembangkan rencana dan kegiatan lanjutan yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat (*public service*) sebagai akibat adanya komunikasi timbal balik dengan

pihak luar. Ternyata hal itu menumbuhkan harapan dan penyempurnaan kebijaksanaan atau kegiatan yang dilakukan organisasi.

Sejalan dengan teori Widjaja mengenai tujuan humas, Dinas Pendidikan memberikan informasi dan menyampaikan ide (gagasan) kepada masyarakat yang membutuh informasi dan gagasan tersebut agar masyarakat mengetahui maksud, tujuan, dan kegiatan yang dilaksanakan sehingga pihak luar Dinas Pendidikan merasakan manfaatnya. Selanjutnya admin *website* resmi Dinas Pendidikan dan admin e-PPID juga membantu pimpinan untuk mempersiapkan bahan tentang masalah yang akan disampaikan. Pegawai juga mempublikasikan informasi dan gagasan tersebut kepada masyarakat karena tugas pemimpin dan sekretaris Dinas Pendidikan tidak dapat langsung memberikan informasi kepada masyarakat. Selain itu Admin *website* dan admin e-PPID yang membantu Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas Pendidikan dalam pengembangan rencana dan kegiatan lanjutan yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat (*public service*) sebagai akibat adanya komunikasi timbal balik dengan pihak luar Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

Fungsi *public relations* yang dikemukakan oleh Onong Unchjana Effendy (Lena Satlita, 2002: 11) yaitu : “membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publik, menciptakan komunikasi dua arah timbal balik dengan menyebarkan informasi dari organisasi kepada publik dan menyalurkan opini

publik eksternal maupun internal dan melayani publik.” Berdasarkan hasil penelitian alur kerja fungsi humas memiliki tujuan meembina hubungan harmonis antara organisasi dengan publik, eksternal maupun internal, menciptakan komunikasi dua arah dengan timbal balik dengan cara menyebarkan informasi melalui *website* yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dan menyalurkan opini publik melalui quisioner IKM dan kotak saran.

Untuk *website* Resmi Dinas Pendidikan menerapkan manajemen keamanan informasi sehingga dalam pengelolaan dilakukan oleh masing-masing bidang memiliki maksimal 2 admin yang memiliki *username* dan *password* yang memiliki kewenangan untuk publikasi informasi yang sudah disetujui oleh Ketua Bidang. Publikasi oleh masing-masing bidang bertujuan untuk mempermudah dalam penyebaran berita dan informasi karena admin dari masing-masing bidang lebih memahami berita apa yang akan dipublikasikan sesuai dengan bidang yang ditempati. Akan tetapi, pengelolaan *website* yang memiliki lebih dari 2 admin memiliki kelemahan untuk keamanan *website* itu sendiri .

Selanjutnya pengelolaan *website* e-PPID merupakan sarana layanan online bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Dinas Pendidikan. PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) yang berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki badan publik sesuai dengan amanat UU 14/2018 tentang Keterbukaan

Informasi Publik. Dengan keberadaan PPID maka masyarakat akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pedokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi di badan publik.

Berdasarkan penelitian, Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumen oleh Dinas Pendidikan merupakan unit yang sudah berjalan dan terkoordinasi serta berisi lebih dari dua orang yang memiliki tujuan melayani masyarakat dalam pelayanan dan permohonan informasi dan dokumen publik. Meskipun tidak ada bagian khusus kehumasan, pengelolaan PPID sudah berjalan dan bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan. Dengan berjalannya kegiatan PPID tersebut, pelaksanaan fungsi Humas sudah terlaksana.

3. Pemanfaatan Media Humas

Media humas merupakan segala bentuk sarana/saluran/*chanel* yang digunakan praktisi humas dalam pekerjaannya dengan tujuan publikasi yang luas agar informasi dan berita yang humas sampaikan lebih dikenal masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sudah sejalan dengan teori Syafaruddin (2015: 25) berpendapat bahwa organisasi merupakan keseluruhan berpaduan unsur manusia dan non manusia yang masing-masing memiliki fungsi dan berinteraksi dalam mencapai tujuan. Sejalan dengan itu Menurut Yosol Iriantara (2011: 47) penggunaan media komunikasi eksternal harus mengutamakan

5W+1H (*What, When, Who, Why, Where, dan How*).

Rencana penyusunan media komunikasi eksternal ini suatu organisasi harus memperhitungkan pihak eksternalnya yang menjadi sasaran pemanfaatan media tersebut dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

- a. Dimana posisi organisasi kita saat ini?
- b. Siapa khalayak sasaran kita?
- c. Apa yang kita inginkan atau apa tujuan kita?
- d. Bagaimana mencapai tujuan itu?
- e. Taktik apa yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut?
- f. Media komunikasi yang seperti apa yang tepat digunakan untuk sosialisasi terhadap khalayak eksternal suatu organisasi tersebut?
- g. Bagaimana cara mengevaluasinya?

Pelaksanaan fungsi kehumasan tidak lepas dari pemanfaatan teknologi. Hampir semua telah melaksanakan sentuhan kehadiran teknologi walaupun pada tingkatan yang berbeda, ada yang telah merasakan manfaat positifnya, ada yang belum, dan ada yang justru mengkhawatirkannya (Simandjutak, dkk, 2003: 179). Sejalan dengan teori tersebut, Dinas Pendidikan telah memanfaatkan teknologi yang ada yaitu :

- a. *Website* resmi Dinas Pendidikan

Website merupakan halaman informasi yang disediakan melalui sehingga dapat diakses seluruh masyarakat melalui

komputer/*handphone* yang terhubung dengan jaringan internet. Berdasarkan hasil penelitian pengelolaan *website* Dinas Pendidikan sudah dibentuk tim pengelola dari masing-masing bidang dengan tujuan memaksimalkan pemanfaatan media. Dalam pengelolaan *website* media penunjang yaitu komputer dan internet untuk menyebarkan/publikasi informasi serta berita dari masing-masing bidang. Sebagian masyarakat Sleman memanfaatkan media *website* untuk mendapatkan informasi dan berita yang dipublikasikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. *Website* resmi yang dimiliki Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman sangat membantu masyarakat dalam mencari informasi mengenai Dinas sendiri. Selain itu *website* juga bermanfaat bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman untuk mempublikasikan berita dan informasi. Akan lebih baik pengelolaan *website* dilakukan oleh pegawai yang memahami bidang kehumasan karena lebih paham dalam menulis berita, berkomunikasi dengan khalayak dan pemanfaatan media-media yang tersedia sehingga struktur kerja dan pemanfaatan media *website* lebih tertata dan terkoordinasi.

- b. e-PPID

PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan serta sosial serta merupakan bagian penting dari ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan

rakyat untuk keterbukaan informasi publik dan merupakan sarana mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan kegiatan Dinas Pendidikan dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan e-PPID merupakan salah satu media humas yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman untuk permohonan dan penyampaian informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan dinas pendidikan. Pelaksanaan PPID di Dinas Pendidikan sendiri sudah berjalan sesuai dengan SOP dan Undang-undang yang berlaku mengenai pelayanan informasi publik.

c. Media sosial

Dinas Pendidikan belum sepenuhnya memanfaatkan media sosial yang ada saat ini. Berdasarkan hasil penelitian, Dinas sendiri sudah memanfaatkan media sosial berupa *twitter*, akan tetapi belum di kelola dengan maksimal karena tidak ada Sumber Daya Manusia (SDM) yang menangani media sosial untuk menyebarkan pengumuman dan informasi. Selain media sosial *twitter*, Dinas Pendidikan belum memanfaatkan media sosial yang berkembang semakin pesat di saat-saat ini. Seperti *youtube*, *instagram* dan *facebook* merupakan media yang mudah diakses masyarakat. Akan tetapi kurangnya SDM dan tidak adanya bagian khusus kehumasan menjadi faktor penghambat dalam pemanfaatan media sosial. Sedangkan untuk memaksimalkan pemanfaatan media yang ada saat ini diperlukan admin khusus yang bertugas untuk mengelola

media sosial sehingga admin tersebut lebih terfokus dalam mengelola media sosial.

Berdasarkan hasil penelitian pemanfaatan teknologi oleh Dinas Pendidikan Sudah dimanfaatkan. Untuk pemanfaatan media humas *website* dan e-PPID sudah berjalan meskipun tidak ada bagian khusus kehumasan dan media tersebut dikelola oleh masing-masing bidang yang ada di Dinas Pendidikan. Untuk media sosial *twitter* yang telah dimiliki belum dimanfaatkan secara maksimal karena kurangnya SDM untuk mengelola media-media humas yang berkembang saat ini.

d. Telepon

Berdasarkan hasil penelitian telepon internal dan eksternal merupakan media yang masih dimanfaatkan dinas pendidikan dalam menyampaikan informasi sesama pegawai hingga masyarakat atau lembaga lainnya. Telepon merupakan media yang penting yang dapat digunakan untuk efisiensi waktu telepon dapat menyebarkan informasi kepada yang bersangkutan secara langsung. Pemanfaatan media telepon oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman sudah maksimal.

Sejalan dengan pemanfaatan media menurut Onong Uchjana Effendy (Lena Satlita, 2002: 11) salah satu dari fungsi *public relations* adalah menciptakan komunikasi dua arah timbal balik dengan menyebarkan informasi dari organisasi kepada publik dan menyalurkan opini publik kepada organisasi. Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Pendidikan sudah menciptakan komunikasi dua arah, untuk menyebarkan informasi dilakukan dengan cara

publikasi melalui *website* resmi Dinas Pendidikan dan papan pengumuman. Sedangkan media sosial *twitter* pemanfaatannya belum maksimal. Untuk menampung opini publik, Dinas Pendidikan memanfaatkan kotak saran yang merupakan media untuk menampung saran dan keluhan. Berdasarkan hasil penelitian, Kotak saran yang ada di Dinas Pendidikan sudah di manfaatkan akan tetapi, penempatan dari kotak saran sendiri tidak strategis dan tertutup pohon sehingga tidak semua masyarakat mengetahui adanya kotak saran. Berdasarkan hasil penelitian media humas dinas pendidikan sudah dimanfaatkan dan dirawat secara berkala. Saran yang diberikan masyarakat diserahkan kepada Sekretaris untuk dilakukan evaluasi dengan tujuan peningkatan kualitas pelayanan yang ada di Dinas Pendidikan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah :

1. Program kerja Dinas Pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi humas yaitu Program Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi, Informasi dan Media Masa yang memiliki sub Program Pengelolaan *Website*. Program kerja tersebut dikoordinasi oleh ibu Susilowati S.Pd dan diketuai oleh bapak Halim Sutono, S.H. Penyusunan Program kerja mengacu pada Renstra (Rencana Strategis). Program kerja tersebut belum terpenuhnya terlaksana dengan baik

dan belum maksimal dikarenakan tidak ada bagian khusus yang menangani kehumasan.

2. Alur kerja yang terjalin dalam pelaksanaan fungsi humas yaitu e-PPID sudah berjalan sesuai dengan SOP dan regulasi yang ada, akan tetapi alur kerja dalam pengelolaan *website* masih kurang dikarenakan banyaknya admin yang mengelola *website* sehingga keamanan *website* kurang terjaga dan *website* kurang terkoordinasi oleh satu komando.
3. Pemanfaatan media di Dinas Pendidikan yang telah tersedia sudah dimanfaatkan meski belum maksimal karena SDM (Sumber Daya Manusia) yang kurang dan tidak adanya pegawai yang memiliki tupoksi khusus kehumasan. Pemeliharaan media humas *website* juga dilakukan setahun sekali dengan melakukan *maintenance website* dan jaringan internet Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Untuk pegawai yang belum dapat memanfaatkan media tersebut secara maksimal, diberikan pelatihan khusus untuk memaksimalkan pemanfaatan media humas.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, S dan kesimpulan yang telah diuraikan peneliti menyampaikan saran tentang pelaksanaan fungsi Humas di Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman :

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman sebaiknya menambah unit kerja atau mengelola lagi tupoksi unit kerja yang

berkaitan dengan pelaksanaan fungsi humas dengan tujuan melihara hubungan baik dengan masyarakat dan lembaga lainnya.

2. Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman sebaiknya membuat satu admin khusus yang bertanggung jawab dalam *publish* berita dan informasi sehingga *username* dan *password* dapat dipertanggung jawabkan oleh satu pihak dan alur kerja bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Sebaiknya memanfaatkan sosial media yang ada saat ini agar informasi dan pelayanan berjalan lancar dan terakomodir dan Dinas akan lebih baik jika melakukan sosialisasi dengan media lain, karena tidak semua masyarakat bisa mengakses informasi dan berita melalui media online.

DAFTAR PUSTAKA

- Cutlip, Scoot, M., Center, Alen H. & Broom, Glen. M. (2009). *Effective Public Relations, Ed.9*. Jakarta: Kencana.
- Lena, Sallita. (2002). *Aktivitas Public Relations Dalam Rangka Membina Hubungan Baik Dengan Media Massa*. Yogyakarta: FISE UNY.
- Nova, F.(2011). *Crisis Public Relations*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Ruslan.(2005).*Manajemen Public Relation & Media Komunikasi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Simandjuntak, J. P, dkk. (2003). *Public Relations*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Suharsaputra, Uhar. (2010). *Administrasi Pendidikan*. Bandung: PT Refika Aditama.

Widjaja, H.A.W. (2008). *Dasar-Dasar Customer Relationship Management (CRM)*. Jakarta : Harvindo.